

ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM IPS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Abdul Manaf

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal, Sigli
manafsigli@gmail.com

Abstract : *Talking about the concept of education cannot be separated from the curriculum. Because the competence of graduates has been decided, the necessary framework and scope of materials to be prepared to be learned and mastered by teachers as main actors of education as stated in Government Regulation No. 20, 2003 of the national education system, in chapter 19 verse one: that the curriculum is a set of plans and arrangements concerning the objectives, content, and materials and how are used as guidelines for learning activities to achieve specific educational goals. The concept of IPS education in this case is an idea that describes the relationship between two or more facts such as the concept of "human needs", which deals with a variety of things, such as clothing, food, safety, education, love, and prestige. The concept can also be interpreted as symbols or ideas created by the students to understand the experiences that occur repeatedly, social sciences (IPS) is not a field of study or discipline, but rather of a social problem and phenomena. Thus, IPS is the study of society and human— it is a social science which is derived from the social.*

Keywords : Curriculum, Social Sciences, Basic Education

Abstrak : Konsep pendidikan tidak terlepas berbicara masalah kurikulum, karena menyangkut dengan kompetensi lulusan yang diinginkan, maka diperlukan kerangka dan ruang lingkup materi yang harus disiapkan untuk dipelajari dan dikuasai oleh guru sebagai penggerak utama lembaga pendidikan sebagaimana yang termaktup dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada Bab satu ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep pendidikan IPS dalam pembahasan ini yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep “kebutuhan manusia”, yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial, jadi IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia, dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial.

Kata kunci: Kurikulum, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Dasar

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu sektor Pembangunan Nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan menjadikan Warga Negara Indonesia yang berkualitas, mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan berkembang, yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan dengan pendidikan sebagaimana yang

termaktub dalam bab satu, pasal satu ayat satu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut pada Bab Dua Pasal Tiga Undang-undang tersebut memberi penekanan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan amanah undang-undang pendidikan sebagaimana yang tersebut di atas maka pendidikan merupakan sebagai wahana utama dalam pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, yang menjadi titik fokus dalam pembahasan ini adalah prilaku (*behaviorisme*, teori John. B. Watson)

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tingkah laku atau prilaku, terlebih dahulu memahami dimaksud tingkah laku sebagaimana yang diungkapkan oleh C.T Morgan yang dikutip oleh Alex Sobur dalam buku Psikologi Umum, bahwa menyebut *instrumental behavior* untuk tingkah laku yang dipergunakan sebagai alat atau cara agar tujuan dapat dicapai. Tingkah laku ini, apakah sesuai atau tidak sesuai, baik atau tidak baik, melanggar atau tidak melanggar norma, semuanya disebut tingkah laku.

Lahirnya prilaku menyimpang dapat dilihat melalui tindakan nyata dalam bentuk kegiatan atau tampilan dari seseorang individu, pernyataan di atas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum terpelajar selama ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat pendidikan Utomo Danan Jaya seperti yang dilansir kompas (26/9/2012), bahwa kembali maraknya tawuran antar pelajar dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang terus menggerus karakter para pelajar. Generasi muda disuguhkan informasi yang lebih banyak mempertontonkan tokoh masyarakat yang berperilaku buruk, jauh dari **ekspektasi**.

Dalam hal ini, Sutrisna berpendapat bahwa prilaku adalah suatu kenikmatan atau kepercayaan individu sebelumnya mengenai hal-hal apa saja yang seharusnya terjadi pada situasi tertentu, sedangkan menurut Boeree:2005, bahwa harapan kesenangan yang tidak konstan yang timbul dari gagasan tentang sesuatu hal di masa depan, Fleming & Levie; 1981 bahwa; segenap keinginan harapan dan cita-cita terhadap sesuatu hal yang ingin diraih dengan tingkah laku serta tindakan nyata.) seharusnya tokoh masyarakat memberi contoh bagaimana cara sopan santun, menghargai sesama, jujur, dan arif. tetapi yang dipertunjukkan justru sebaliknya,

Membentuk karakter di sekolah, salah satunya menjadi tugas guru, akan tetapi kemampuan guru sebatas menguasai transfer ilmu pengetahuan, bukan penekanan pada metode belajar. "Guru tidak mempelajari metode belajar yang dapat mengembangkan karakter pelajar," ungkap Utomo, lebih lanjut Heri Rahyubi memberikan penekanan bahwa prilaku adalah apa yang dapat dilihat dan dipelajari, jadi kawum penganut aliran behavioral memandang bahwa individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah. Jadi perilaku sosial merupakan suatu bentuk tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan orang lain, perilaku sosial seseorang dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan karena perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan John. B. Watson bahwa; "Beri aku selusin bayi yang sehat dan tegap. Aku akan membesarkan mereka dalam duniaku sendiri yang telah kutentukan. Akan kupilih satu dari mereka secara acak dan melatihnya menjadi seorang spesialis; entah dokter, pengacara,

artis, pembisnis, bahkan pengemis dan pencuri tanpa menghiraukan bakat, kegemaran, kecendrungan, kemampuan, panggilan hati, dan ras keturunan mereka”.- John. B. Watson-

Jadi sangat jelas bahwa untuk membentuk perilaku seseorang sangat tergantung pada pengalaman melihat, mendengar terhadap sesuatu dan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga terbentuk dalam diri seseorang dan melahirkan tindakan-tindakan nyata, seperti cara berbicara, pakaian yang digunakan, dan cara melihat.

Situasi sosial kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dalam beberapa dasawarsa sungguh sangat terpuruk, hal ini dibuktikan dengan tingkat kepedulian sosial antar individu, kelompok dan masyarakat, bahwa nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia kebersamaan yang selalu mengedepankan sifat toleran dalam berbagai aspek kehidupan.

Terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai kehidupan ini tidak semuanya merupakan hasil sebuah pembelajaran yang telah dilakukan pada masa lalu, hal ini sesuai dengan pendapat Muhibbin Syah, bahwa secara teoritis belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku organisme dapat dianggap belajar, dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan bisa terjadi yang diakibatkan dari berbagai pengaruh lingkungan kehidupan, maupun pengaruh dari kemajuan teknologi informasi.

Terkait hal ini Mulyasa berpendapat bahwa memandang adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat kita yang intinya menuju kehancuran dan pembentukan nilai-nilai baru yang didasarkan atas pragmatisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, dan atheisme.

Sedangkan Adeyemi et al. Lebih menekankan bahwa sekolah merupakan bagian dari sosial, sehingga sekolah juga mempunyai peran dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Pendapat di atas menjelaskan bahwa peran guru sebagai bagian dari sekolah dan yang berhubungan langsung dengan siswa di kelas mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, kepribadian dan perilaku siswa. Oleh karena itu, sudah seyakinya bila setiap guru mempertimbangkan dan mengaitkan antara kondisi dan lingkungan siswa dengan karakter yang akan dikembangkan.

Menurut Tirtarahardja bahwa lingkungan utama yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan khususnya di Indonesia yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah (sekolah) ketiganya itu sering disebut dengan tripusat pendidikan yang masing-masing lingkungan tersebut memiliki peran yang sama dan saling melengkapi.

Tripusat pendidikan adalah istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, 1922 (dalam Tirtarahardja, 2008. Konsep tripusat pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki arti yaitu pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah), pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di keluarga. Ketiganya sering disebut sebagai lingkungan sosial siswa, merupakan tiga unsur penting yang berperan dalam pendidikan dan menjadi pusat kegiatan pendidikan. Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang menerima pendidikan. Akibat dari perkembangan zaman dan keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka kegiatan pendidikan juga dilaksanakan di suatu lembaga yang disebut sekolah atau madrasah. Masyarakat merupakan tempat atau unsur yang berperan penting dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian seorang hingga menjadi pribadi yang shaleh, cerdas, terampil dan mandiri maka diperlukan suatu pola kerjasama yang intensif antara keluarga, sekolah/madrasah dan masyarakat.

Tidak terbentuknya kerjasama pada tripusat pendidikan selama ini sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara sehingga berdampak terhadap perilaku sosial, hal ini sesuai dengan kasus dua remaja yang harus berurusan dengan kepolisian di Semarang pada tanggal 26 Januari 2018, video porno yang berdurasi tiga menit yang diperankan siswa SMP Negeri dan siswi SMK Negeri di kabupaten Semarang, video tersebut sempat beredar secara luas dikalangan pelajar pada bulan Desember 2017, menurut kepala sekolah yang dilakukan

siswa tersebut merupakan pelanggaran berat, maka kedua siswa tersebut pada tanggal 15 Januari 2018 mengundurkan diri dari sekolah. Bupati Semarang prihatin, karena kejadian tersebut bukan hanya mencoreng dunia pendidikan di kabupaten Semarang, bahkan mencoreng pendidikan di Indonesia.

Hal senada juga terjadi di Pekanbaru, bahwa seorang mahasiswi (23 tahun) nekat meng-*Upload* video mesum bersama pacarnya di FB, perbuatan nekat itu dilakukan untuk memancing keberadaan pacarnya (cewek), selama ini pacarnya kabur dari rumahnya karena malu video perbuatan mesumnya sudah beredar, akhirnya keduanya berurusan dengan polisi. Lebih lanjut perilaku menyimpang ditampilkan oleh dua pelajar SMA di kabupaten Sleman Yogyakarta yaitu melempar batu seberat 4 kg ke arah kaca depan mobil Toyota Camry hingga tewaskan pengemudi dengan tujuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diberitakan Prohaba pada tanggal 23 Januari 2018, halaman 2.

Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan (ledakan penduduk) (Teori Robert Meltus) secara baik dan tidak sesuai dengan pertumbuhan makan serta perkembangan penduduk yang tidak dapat didayagunakan sebagaimana mestinya sehingga memberi sumbangan yang besar terhadap nilai-nilai kehidupan warganya, dua kontribusi besar yang memberikan dampak negatif dikalangan kehidupan masyarakat misalnya, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, terjadinya diskriminasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuknya pelapisan sosial yang dapat meningkatkan kecemburuan sosial dan berakibat pada pembunuhan, penipuan, pencurian, permasalahan tersebut sebagaimana yang terjadi di Bantul yaitu tiga pelaku pencurian dengan kekerasan diantaranya pelajar, umur mereka satu orang 17 tahun dan dua orang 18 tahun, salah satunya berstatus pengangguran, pencurian tas pengedara roda dua di jalan raya.

Kasus Ibu F alias Y (inisial) berusia 31 tahun di Jakarta melakukan penjualan bayi yang berkelamin putri berusia tiga bulan seharga 20 juta rupiah kepada pasangan suami istri di pulau Jawa, alasan Yanti menjual banyinya karena merasa terbebani dengan keberadaan putri kelimanya dan takut tidak sanggup memberi nafkah, kasus ini berujung ke pengadilan.

Contoh kasus yang lainnya sebagaimana yang terjadi di Sekolah Dasar Kelurahan Pakunden, Kota Kediri bahwa murid Sekolah Dasar Kelas V dikeroyok dan dipalak temannya, dengan kronologisnya pada hari Kamis 18 Januari 2018 pada jam istirahat korban bersama-sama dengan temanya bermain bola kaki di lapangan halaman sekolah, pada saat itu korban melakukan tendangan bunuh diri, menendang bola ke arah gawangnya, entah sengaja atau tidak, akibatnya teman sekelasnya langsung melakukan penganiayaan dan pengoroyokan sehingga korban harus di rawat secara Intensif di ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri.

Kenyataan di atas sesuai dengan artikel yang dimuat di <http://bercityindonesia.com/blogs/180794/12088>, posted on October 17, 2012 by vitocardo, dengan judul Fenomena Tawuran antar Pelajar dan penyebabnya, disini menceritakan bahwa Fenomena tawuran antar pelajar akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia, meskipun pemerintah selama ini bersama-sama dengan lembaga pendidikan dan juga masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut, tapi kejadian ini tetap saja terjadi.

Hal ini sangat tragis dan ironis sekali karena tawuran antar pelajar melibatkan anak-anak muda yang mempunyai intelektual, yang nantinya akan menjadi para penerus bangsa ini. Tawuran ini identik dengan hal-hal dalam pemuasan diri pribadi atau kelompok tertentu yang berada di dalamnya. Akibatnya sikap egosentrisme yang ditonjolkan mengarah pada kebiasaan buruk. Dan apabila pemenuhan dan keinginan tersebut tercapai maka para pelajar akan senantiasa merasa bangga meskipun bersifat negatif. Individu dalam bertingkah laku yang disebabkan dari dorongan dalam dirinya untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini bersifat esensial bagi kelangsungan kehidupan individu itu sendiri. Jika individu berhasil

memenuhi kepentingannya, maka akan merasa puas dan sebaliknya bila gagal akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya.

Lulusan pendidikan di Indonesia sudah baik, hal ini dibuktikan bahwa lulusan pendidikan sudah mengisi lapangan kerja di pemerintahan yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi ada diantaranya melakukan perilaku menyimpang, hal ini dibuktikan dengan berbagai kasus, sebagai contoh kasus sebagaimana yang terjadi di Lhokseumawe bahwa seorang mahasiswi menjadi korban pemerkosaan oknum PNS di Pemko Lhokseumawe senin 25 Desember 2018, sehingga korban menjadi trauma berat, kasus tersebut sudah ditangani kepolisian Polres Lhokseumawe. Lebih miris lagi perlakuan seorang guru agama berinisial MS (23 Th) pada Yayasan Teratai putih Global School di Bekasi menggagahi tiga orang muridnya yang masih di bawah umur terjadi sejak November 2017 karena guru sering nonton video porno.

Namun demikian harus dipahami bahwa tidak semua lulusan lembaga pendidikan menampilkan sifat negatif, dan lebih banyak yang berakhlak mulia, sebagaimana yang ditampilkan oleh seorang anggota polisi satuan lalu lintas Polres Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Bribka Y (inisial), sebagaimana yang dikutip serambi Indonesia, yaitu menyuapi makanan kepada orang tua yang tidak dikenalnya saat bertugas di Pos Lalu Lintas Kabupaten Barru, dan mendapat penghargaan dari Kapolda Sulawesi Selatan dan penghargaan dari Kapolri. Contoh kasus polisi di atas merupakan perbuatan yang sangat langka dilakukan oleh aparaturnya negara yang notabene lulusan lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga seorang yang berpangkat Bribka mendapat penghargaan dari institusinya yang luar biasa dan masyarakat luas mengaguminya. Ini mungkin salah satu bukti bahwa pendidikan Ilmu Sosial penting diberikan oleh guru yang mempunyai pengetahuan secara luas dan bertanggung jawab serta mampu membentuk tingkah laku peserta didiknya secara baik.

Dengan berbagai macam ragam pikiran dan tindakan menyimpang yang dilakukan individu sesuai menurut karakteristik individu itu sendiri, lembaga pendidikan sebagai tempat perwujudan karakter yang baik bagi siswa, pernyataan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhibbin Syah bahwa setiap perilaku belajar selalu di tandai dengan ciri-ciri yang spesifik, yang diperkuat dengan kutipannya dari buku Psikologi Pendidikan oleh Surya (1982) menekankan bahwa ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1) perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, bukan kebetulan. Contohnya merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan tertentu, sedangkan perubahan yang diakibatkan oleh mabuk, gila dan lelah tidak termasuk dalam karakter belajar, 2). Perubahan Positif-Aktif, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif, dapat bermanfaat sesuai dengan harapan, dan 3). Perubahan Efektif-Fungsional, yaitu perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Setelah melihat beberapa pendapat para ahli diatas maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk penyelenggara pendidikan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan karakteristik perilaku siswa yang menyimpang.

Dari keragaman pikiran dan tindakan yang muncul dikalangan siswa dewasa ini, guru dituntut kemampuan lebih dalam menghadapi situasi sosial siswa seperti ini, untuk meningkatkan kemampuan guru diperlukan pendidikan tambahan berupa *inservice training*, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), atau menjadi anggota asosiasi guru seperti PGRI, KOBAR-GB atau nama lain, dengan keikutsertaan guru dalam berbagai kegiatan keilmuan dan keilmiah secara berlahan-

lahan guru akan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai macam situasi sosial siswa.

Disamping itu, untuk terbentuknya karakter siswa yang lebih baik perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam bentuk pengenalan nilai-nilai, sehingga diperolehnya secara sadar akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat Rudy Gunawan, bahwa IPS dan Humaniora merupakan dua bidang kajian yang potensial bagi pengembangan tugas-tugas pembelajaran yang kaya nilai, karakteristik ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan banyak membahas tentang bagaimana manusia dapat menjalin hubungan harmonis dengan sesama, lingkungan dan Tuhan. membuat dua bidang kajian ini sangat kaya dengan sikap, nilai, moral, etika dan perilaku.

Lebih lanjut Mulyasa berpendapat tentang cara membentuk sikap dan karakter bagi peserta didik bahwa menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulyardi memberikan penekanan bahwa pembelajaran merupakan suatu upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar. Pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana upaya guru mendorong atau memfasilitasi peserta didik belajar, bukan pada apa yang dipelajari peserta didik. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan bahwa peserta didik lebih banyak berperan dalam mengkonstruksikan pengetahuan bagi dirinya dan bahwa pengetahuan itu bukan hasil proses transformasi dari guru.

Jadi, dapat dipahami bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin-disiplin ilmu, memperkenalkan konsep, generalisasi, teori, cara berpikir, dan cara kerja disiplin ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan suatu mata pelajaran yang menduduki konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan pertimbangan psikologis yang bertujuan agar pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi/bahan ajar disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik.

2. Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Konsep Pendidikan IPS

Istilah ilmu pengetahuan sosial (IPS) yaitu sebagaimana yang dirancang dalam kurikulum 2004, sulit dicarikan definisinya, karena dalam berbagai literatur, baik yang ditulis oleh ahli dari luar maupun dalam negeri, yang ditemukan istilah ilmu pengetahuan sosial adalah merupakan terjemahan dari *social studies*. Sedangkan nama IPS dalam dunia pendidikan dasar di negara Indonesia muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum SD, SMP dan SMU tahun 1975.

Pengertian pendidikan IPS dalam istilah asing lebih dikenal dengan istilah *Social Studies*. Sebuah organisasi profesional yang diberi nama *National Council for the Social Studies* (NCSS) yang secara khusus membina dan mengembangkan *Social Studies* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan. Pada tahun 1993 NCSS merumuskan *social studies* sebagai berikut: *Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provide coordinated,*

systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Memasukkan IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari sebagai bidang studi “baru”, karena cara pandangnya bersifat terpadu, *multidisiplin dan interdisipliner*, mengandung arti bahwa IPS bagi pendidikan dasar dan menengah merupakan hasil perpaduan dari mata pelajaran geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Karena objek material kajiannya sama yaitu manusia

Berbicara masalah konsep pendidikan tidak terlepas berbicara masalah kurikulum, karena menyangkut dengan kompetensi lulusan yang diinginkan, maka diperlukan kerangka dan ruang lingkup materi yang harus disiapkan untuk dipelajari dan dikuasai oleh guru sebagai penggerak utama lembaga pendidikan sebagaimana yang termaktup Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada Bab I Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi keberhasilan pendidikan khususnya di sekolah formal tidak terlepas dari peranan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan sebagai acuan dan pedoman dalam kegiatan pendidikan. Penyempurnaan dan perubahan kurikulum merupakan tuntutan di dunia pendidikan sebagai wujud penyesuaian dari perkembangan masyarakat dan kemajuan globalisasi.

Konsep pendidikan IPS dalam pembahasan ini yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep “kebutuhan manusia”, yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial, jadi IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia, dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. Trianto berpendapat bahwa konsep IPS itu meliputi: interaksi, saling ketergantungan, kesinambungan dan perubahan, keragaman atau kesamaan atau perbedaan, konflik dan konsensus, pola, tempat, kekuasaan, nilai kepercayaan, keadilan dan pemerataan, kelangkaan, kekhususan, budaya, dan nasionalisme.

Dimensi pengetahuan mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Dimensi keterampilan merupakan kecakapan mengolah dan menerapkan informasi, meliputi: keterampilan meneliti, berfikir, partisipasi sosial, dan berkomunikasi. Dimensi nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah melekat dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Dimensi tindakan, peserta didik belajar berlatih secara konkrit dan praktis sehingga peserta didik menjadi aktif. Sedangkan dimensi-dimensi pendidikan IPS sebagaimana pendapat Sapriya bahwa dimensi pendidikan IPS komprehensif meliputi empat dimensi, yaitu: dimensi pengetahuan (*knowledge*), dimensi keterampilan (*skills*), dimensi nilai dan sikap (*values and attitudes*), dan dimensi tindakan (*action*).

Menurut pendapat Ruri Andriyani bahwa Pembelajaran IPS adalah berusaha membantu siswa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya, agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti yang diharapkan oleh

dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama. Sedangkan Kosasih (Waterworth, 2007) memberikan penekanan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar pada dasarnya dimaksudkan untuk pengembangan pengetahuan, sikap, nilai-moral, dan keterampilan siswa agar menjadi manusia yang mampu memasyarakat (*civic-community*).

Menyangkut dengan tujuan pembelajaran IPS mengutip beberapa pendapat ahli tujuan ilmu pengetahuan sosial, para ahli sering mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari program pendidikan tersebut. Waterwroth (2007: 5) menyebutkan bahwa tujuan *social studies* (IPS) adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat, dimana secara tegas mengatakan "*to prepare students to be well-functioning citizens in a democratic society*".

Tujuan lain dari IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. "*We also think that the social studies should be more concerned with helping student make the most rational decisions that they can in their own personal lives.*" (NCSS, 2007). Hasan (2007) berpendapat bahwa tujuan dari IPS adalah untuk: mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai peserta didik sebagai individu maupun sosial dan budaya. *National Council for the Social Studies* (NCSS, 2007) menyatakan bahwa: *The primary purpose of social studies to help young people develop the ability to make informed and reasoned decision for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.*

Sementara Jackson (2004) berpendapat bahwa: *the purpose of social studies is to prepare youth for citizenship, there's also general agreement that the elements of a sound citizenship education are knowledge, skills, values, and participation.* Sejalan dengan pendapat Jackson, Chapin dan Messick (2001) berpendapat bahwa tujuan IPS adalah: (1) *to provide knowledge about human experiences in the past, present, and future*, (2) *to develop skill to process information*, (3) *to develop appropriate democratic values and attitudes*, and (4) *to develop opportunities for social participation.*

Di sisi lain, melalui pembelajaran IPS diharapkan mampu dikembangkan aspek pengetahuan dan pengertian (*knowledge and understanding*), aspek sikap dan nilai (*atitude and value*), dan aspek keterampilan (*skill*) (Skeel, 1995; Jarolimek, 1993).

Tujuan pendidikan IPS adalah untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, analitis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi yang produktif. Pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat adalah pengetahuan penting yang memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Sikap religius, jujur, demokratis adalah sikap yang diperlukan oleh seorang warganegara di masa kini maupun masa depan. Kebiasaan senang membaca, kemampuan belajar, rasa ingin tahu merupakan kualitas yang diperlukan untuk belajar seumur hidup. mata pelajaran IPS membangun kepedulian terhadap kondisi lingkungan sosial dan fisik, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu sadar dalam melakukan interaksi dengan lingkungan tempat tinggalnya serta mempunyai kemampuan untuk berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, jadi disini perlu ditekankan bahwa komunikasi adalah kemempuan yang sangat penting untuk kehidupan di abad ke-21, semakin baik kemampuan berkomunikasi semakin baik interaksi yang terjadi

Kerangka kerja IPS tidak memberikan penekanan pada teori, karena IPS bukan suatu bidang keilmuan melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian terhadap gejala dan masalah-

masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. namun demikian IPS merupakan satu pengetahuan praktis yang dapat di ajarkan pada tingkat sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), jenjang Sekolah Lanjutan Atas (SLTA/MA) sampai ke Perguruan Tinggi.

Pendekatan yang digunakan dalam IPS sangat berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam Ilmu Sosial lainnya. Pendekatan pada IPS bersifat *interdisipliner* atau bersifat *multidisipliner* dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan, sedangkan pendekatan yang digunakan *Sosial Sciences* bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing- masing, demikian pula sampai pada jenjang yang lebih rendah, pendekatan yang bersifat *multidimensional*, yaitu meninjau satu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi atau aspek kehidupan.

2.2 Perkembangan Kurikulum IPS

IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut.

- 1) Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
- 2) Laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut.
- 3) IPS sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat agar *output* pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum tahun 1964

Program pengajaran ilmu-ilmu sosial dalam Kurikulum tahun 1964 masih menggunakan pendekatan tradisional. Adapun Ilmu sosial yang dijadikan mata pelajaran dalam kurikulum tersebut meliputi pelajaran sejarah, geografi (ilmu bumi) dan pelajaran ekonomi dan masih diajarkan secara terpisah, sistem tersebut telah usang dan tidak relevan. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat Kurikulum Tahun 1964 terdapat pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia yang berakhir dengan kegagalan Partai Komunis Indonesia (PKI) melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila, dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua kelompok mata pelajaran yakni kelompok dasar dan kelompok cipta. Kelompok dasar adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa dan siswi sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran kelompok dasar ini terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Kedua mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membina kualitas siswa dan siswi sebagaimana yang diharapkan. Lebih-lebih dalam suasana kehidupan politik bangsa baru yang memerlukan adanya identitas bangsa yang kuat. Mata pelajaran kelompok cipta adalah kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar wilayah geografis Indonesia. Mata pelajaran kelompok cipta ini terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. Kedua mata pelajaran ini merupakan bagian disiplin sejarah dan geografi yang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dimaksudkan dalam pembahasan ini.

Kurikulum pendidikan menengah istilah yang digunakan untuk struktur kurikulum adalah kelompok dasar dan kelompok khusus. Kelompok dasar adalah kelompok mata

pelajaran yang harus diambil semua siswa, sedangkan kelompok khusus adalah mata pelajaran yang hanya diambil oleh siswa yang memasuki jurusan tertentu (pada waktu itu ada jurusan ilmu alam, sosial, dan budaya). Mata pelajaran pada kelompok dasar meliputi sejarah Indonesia dan geografi Indonesia, sedangkan pada kelompok khusus yaitu kelompok mata pelajaran yang bersifat pendalaman pada jurusan tertentu, seperti jurusan Ilmu sosial mempelajari mata pelajaran sejarah dunia, geografi dunia dan ekonomi. Jadi untuk kurikulum 1964 pada pendidikan menengah mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi merupakan perwakilan pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam Kurikulum 1964 mendominasi pemikiran sesuai dengan situasi sosial kehidupan bermasyarakat pada waktu itu. Meskipun di negara asal IPS (*social studies*), di Amerika Serikat, sudah terjadi perubahan mengenai ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu sosial, namun perubahan yang terjadi di Amerika itu masih bersifat lokal dan belum merupakan sesuatu yang bersifat nasional. Pada waktu itu para pemikir kurikulum di negara itu masih mendasarkan diri pada pendidikan sejarah dan geografi sebagai dasar utama pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Hal ini, sejalan dengan pendapat *Scriven* bahwa sejarah, geografi, dan psikologi dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bersifat *korelatif* dan *integratif*. *Scriven* lebih lanjut menekankan bahwa geografi memiliki ruang lingkup kajian mengenai distribusi keruangan manusia dan pengaruhnya dalam skala besar terhadap dunia sehingga keberbagai konsep, *generalisasi*, dan teori dari disiplin lain dapat dikembangkan di atasnya. Demikian juga sejarah dapat dijadikan dasar kedua karena sejarah membahas distribusi waktu dan hasil-hasil yang dicapai umat manusia sehingga mampu mendasari berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat manusia. Psikologi berkenaan dengan kajian mengenai organisasi internal keutuhan manusia sehingga dapat menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan manusia dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat manusia. Lebih lanjut *Scriven* menggambarkan keterkaitan ketiga disiplin ilmu itu sebagai kaki tiga yang menopang ekonomi, sosiologi, antropologi, pemerintahan, dan etika dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ia mengemukakan bahwa di atas ketiga kaki inilah dibangun pendidikan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pengaruh pendapat *Scriven* terhadap kedudukan pendidikan sejarah dan geografi dalam Kurikulum 1964 sukar ditentukan dan bukan tujuan pembahasan ini untuk membuktikan pengaruh tersebut. Lagipula, tidak keseluruhan pemikiran *Scriven* tersebut diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Secara resmi suasana politik di Indonesia pada saat Kurikulum 1964 dikembangkan tidak menginginkan adanya pengaruh Amerika Serikat. Semangat politik bangsa Indonesia yang didominasi oleh ajaran MANIPOL-USDEK serta sikap anti Barat (terutama Amerika Serikat) tidak menghendaki adanya pengaruh tersebut. Apalagi pengaruh dalam pendidikan yang merupakan sesuatu yang peka dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa pada masa depan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam status pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia saat itu adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial di tingkat perguruan tinggi di Indonesia masih terbelakang. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia meskipun banyak jumlahnya, namun ilmu-ilmu sosial belum banyak mendapat perhatian kecuali pada ekonomi. Antropologi masih merupakan barang langka diperguruan tinggi. Demikian pula sejarah, sosiologi, politik, dan geografi, dengan demikian tuntutan akademik terhadap kurikulum sekolah di bawahnya, terutama pendidikan dasar dan menengah, belum kuat. Kenyataan lain adalah perhatian utama para pengambil keputusan kurikulum, (pada waktu itu dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah) belum mendasarkan diri pada pengembangan keilmuan yang lebih luas.

Selain itu, kenyataan di lapangan dan teori menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di tingkat persekolahan tidak selalu harus diupayakan untuk pengembangan keilmuan yang masih langka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa disiplin ilmu-ilmu sosial lain belum mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, realitas lain adalah dampak kurikulum bagi persiapan siswa untuk menempuh pendidikan lanjutan di perguruan tinggi belum menjadi permasalahan. Tuntutan perguruan tinggi mengenai apa saja dasar-dasar keilmuan yang harus dikuasai siswa di MA/SMA/SLTA belum kuat dan jelas. Konsekuensi lain dari ketidakjelasan tuntutan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi mengajarkan kembali apa yang sudah pernah dipelajari siswa dan siswi di MA/SMA/SLTA. Hal ini disebabkan perguruan tinggi merasa bahwa materi yang dimaksudkan dianggap penting, sedangkan siswa tidak yakin bahwa materi tersebut sudah dipelajari di MA/SMA sebagaimana mestinya. Dalam situasi semacam ini tentu yang menjadi korban adalah siswa yang diterima menjadi mahasiswa serta masyarakat. Siswa terpaksa harus mempelajari kembali bahan yang sudah pernah dipelajari dalam tingkat kedalaman yang tidak berbeda (terutama untuk mata kuliah yang bersifat pengantar di perguruan tinggi).

2.4 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1968

Dalam Kurikulum Tahun 1968 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan ilmu sosial masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, dan ekonomi. Perubahan nama dari kurikulum sebelumnya adalah nama mata pelajaran *civics* pada kurikulum 1964 diubah menjadi kewarganegaraan. Beberapa waktu kemudian diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan terakhir disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam Kurikulum 1968 tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus.

Menyangkut dengan pengembangan kurikulum IPS, Prof. Dr. Soepartinah Pakasi, sebagai ahli pendidikan dan guru besar pada IKIP Malang, sebagai penganut *social studies* yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1968 telah menerapkan pola pengajaran *social studies* pada sekolah percobaan IKIP Malang yang dipimpinnya, dalam penerapannya, guru-guru *social studies* di sekolah-sekolah tersebut di samping diberi pedoman pelatihan keterampilan secara khusus juga didampingi oleh sebuah regu dosen jurusan sejarah, geografi dan ekonomi. Dalam lingkup nasional ide-ide untuk menerapkan pengajaran *social studies* mulai ramai diperbincangkan sekitar tahun 1971/1972. Untuk menyongsong dilaksanakannya pengajaran *social studies*, telah dilaksanakan seminar-seminar sosial seperti Seminar Sejarah di Yogyakarta pada tahun 1971, Seminar Geografi di Semarang pada tahun 1972, dan Seminar Kependudukan di Bandung pada tahun 1973. Pada tahun 1972, Badan Penelitian Pendidikan (Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan BP3K), di Jakarta diselenggarakan pertemuan para ahli pendidikan berbagai disiplin ilmu dari IKIP dan lembaga-lembaga lain untuk membahas masalah rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Pertemuan tersebut menyepakati penerapan prinsip kerja kurikulum *Broad field* (organisasi kurikulum yang dibuat dengan melebur mata pelajaran-mata pelajaran sejenis kedalam satu bidang studi. Batas-batas antara mata pelajaran yang dilebur itu menjadi kabur) untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, yaitu sistem kurikulum yang mengelompokkan mata pelajaran sejenis yang menjadi satu bidang studi. Disepakati pula untuk mata pelajaran kemasyarakatan (ilmu sosial) seperti sejarah, geografi, ekonomi dan lain-lain dikelompokkan (di padukan) dalam satu bidang studi dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pemaduan ilmu-ilmu sosial menjadi bidang studi IPS di terapkan pada Kurikulum 1974 untuk 8 buah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP). Setahun

kemudian nama bidang studi IPS resmi memperoleh status formal melalui pembakuan Kurikulum 1975 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2.5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1975

Pengembangan Kurikulum Tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh Kementerian/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan Kurikulum Tahun 1975 menjadi lebih jelas, baik dari segi pendekatan maupun tujuannya. Model pendekatan tujuan ini dikenal pula dengan nama model *Tyler* dan mempunyai pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui para sarjana yang pulang dari belajar di negara tersebut.

Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru digunakan pula pendekatan pengembangan materi kurikulum yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran dalam kurikulum 1975 digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dalam kurikulum dasar materi *broad file* IPS meliputi disiplin geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Untuk jenjang MI/SD mata pelajaran IPS menggunakan pendekatan sesuai dengan ide IPS, sedangkan untuk jenjang MTs/SMP menggunakan pendekatan terpisah. Untuk kurikulum IPS pada jenjang pendidikan menengah, materi IPS meliputi geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Dalam Kurikulum ini dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi) sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dari batasan pengertian IPS, tampak bahwa definisi IPS yang digunakan pada Kurikulum Tahun 1975 sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam definisi itu dikatakan bukan paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata pelajaran sosial.

Dalam dokumen kurikulum yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang dimaksudkan sebagai mata pelajaran sosial adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS pada jenjang pendidikan dasar disebutkan bahwa materi pelajaran IPS ditunjang geografi dan kependudukan, sejarah, dan ekonomi-koperasi, sedangkan untuk menengah IPS mencakup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi, orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambarkan dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

2.6 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1984

Kurikulum Tahun 1984 merupakan penyempurnaan Kurikulum Tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP, sama seperti dalam Kurikulum 1975. Disiplin ilmu yang dimasukkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar (MTs/SMP) menjadi lebih luas dibandingkan dengan Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik dijadikan materi baru bagi IPS. Dilihat dari jumlah disiplin ilmu yang tercakup, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Tahun 1984 untuk IPS lebih maju jika dibandingkan dengan Kurikulum Tahun 1975.

Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi-sosiologi, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu

merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian tiap-tiap disiplin ilmu memiliki GBPP yang berbeda yang secara fisik terpisah dan isinya tidak berhubungan.

Selain itu, mata pelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut berbeda dalam status kurikulum. Ada yang dimasukkan ke dalam kelompok program inti dan ada yang dimasukkan menjadi kelompok program pilihan. Program inti adalah program yang diberikan kepada semua siswa, sedangkan program pilihan hanya diberikan kepada kelas atau jurusan tertentu.

2.7 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 1994

Kurikulum IPS Tahun 1994 adalah kurikulum yang akan digunakan pada tahun 1994. Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993 disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang mencakup ilmu bumi, sejarah (nasional dan umum), dan ekonomi. Walaupun kalangan ilmuwan geografi tidak sependapat dengan istilah ilmu bumi dan keduanya dianggap tidak sama, dalam kurikulum ini yang dimaksudkan dengan ilmu bumi adalah geografi yang dikenal dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, keputusan yang sama menunjukkan bahwa mata pelajaran IPS memperhatikan pengertian dasar dari konsep-konsep pendidikan disiplin ilmu sosial yang menjadi anggota IPS.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa IPS sebagai suatu nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki anggota disiplin ilmu yang sama dengan kurikulum sebelumnya. Demikian juga kajian terhadap rancangan GBPP memperlihatkan bahwa pendekatan pengajaran yang integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar di MI/SD, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat MTs/SMP pendekatan disiplin ilmu terpisah (*separated disciplinary approach*) merupakan sesuatu yang tetap dominan. Bahkan, dalam rancangan GBPP tersebut dinyatakan bahwa geografi, sejarah, dan ekonomi masing-masing mendapatkan jatah 2 jam pelajaran per minggu. Artinya, GBPP IPS MTs/SMP menyatakan bahwa tiap anggota kurikulum IPS itu bersifat mandiri dengan tujuan, materi, dan juga jam pelajaran yang terpisah. Bentuk pengajaran yang terpisah dan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu itu terlihat secara jelas dalam setiap komponen GBPP (tujuan, pengalaman belajar, dan materi). Tampak di setiap kelas dan setiap catur wulan (sistem semester yang dianut Kurikulum 1984 diganti dengan satuan lama yaitu catur wulan, berlaku untuk pendidikan dasar, MI/SD dan MTs/SMP, serta pendidikan menengah MA/SMA). Komponen-komponen kurikulum untuk ketiga disiplin itu dijejerkan sehingga secara fisik terlihat dekat. Secara konseptual antara ketiganya tidak berhubungan.

Dalam GBPP disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTs/SMP dan MA/SMA adalah setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang berbeda. Hanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ketiga disiplin tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran yang demikian tidak saja memperkuat kemandirian (ketiadaan hubungan antara ketiga disiplin itu dalam satu kurikulum yang sama), tetapi juga menunjukkan bentuk pendidikan ilmu-ilmu sosial yang diinginkan. Kiranya penggabungan ketiganya dalam satu kurikulum dengan nama IPS pada jenjang pendidikan MTs/SMP hanya untuk menghilangkan kesan padatnya materi kurikulum MTs/SMP dan untuk memperlihatkan hubungan semu dengan kurikulum IPS di MI/SD.

Posisi kurikulum semacam ini kurang menguntungkan, bila pendidikan ilmu-ilmu sosial di MTs/SMP diajarkan dalam bentuk terpisah, karena akan menampilkan ketidakseimbangan antara apa yang didefinisikan sebagai IPS pada bagian awal GBPP dengan kenyataan materi kurikulum. Pengertian IPS dalam kalimat pertama jelas memperlihatkan adanya upaya untuk menggunakan bentuk pendidikan IPS yang korelatif, tetapi apa yang dikemukakan dalam kalimat berikutnya menunjukkan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum IPS didasarkan pada pendekatan disiplin terpisah.

2.8 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum 2013

Dalam kurikulum 2013, tidak ada tercantum mata pelajaran IPS dalam struktur Kurikulum 2013 untuk SD/MI dan SMP/MTs. Di SMA dan SMK akan tetapi mata pelajaran yang terkait dengan disiplin-disiplin ilmu yang secara tradisional dikelompokkan ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial.

Referensi

- Ametembun, N. A. 1981. *Supervisi Pendidikan Penuntun Bagi Para Kepala dan Guru-guru*. Bandung: Suri
- Daldjoeni, N. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Alumni
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar (*Primary School Teacher Development Project*). 1999.
- Harian Prohaba. 2018. Minggu tanggal 28 Januari
- Harian Prohaba. 2018. Sabtu tanggal 20 Januari
- Harian Prohaba. 2018. Sabtu, 27 Januari 2018
- Harian Serambi Indonesia 2017. Selasa Tanggal 26 Desember
- Harian Serambi Indonesia 2018. Sabtu, Tanggal 20 Januari
- Hasan, Hamid. 1996. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Heri Rahyubi, Dr, M.Pd. 2012. *Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik, Deskripsi Dan Tinjauan Kritis*. Jawa Barat : Nusa Media
- Isjoni. 2007. *Cooperative learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok*. Pekanbaru:Alfabeta
- Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika Vol. 3, No.2. April 2015. Online
- Marc, C. 1991. *Teaching Social Studies*. New York: Prentice Hall
- Muliyardi. 2002. *Strategi Pembelajaran Matematika*. Padang: Matematika FMIPA UNP
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa, E. 2011. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nadir, dkk. 2009. *Ilmu Pengetahuan Sosial 1*, Ed.1. Surabaya: Amanah Pustaka
- Rudy Gunawan. 2011. *Pendidikan IPS Filosofi, konsep dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta
- Rusdi, Muhammad dkk. 1983. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Surabaya: Tim IPS FPIS IKIP Surabaya
- Samlawi, Fakih dan Bunyamin Maftuh. 1990. *Konsep Dasar IPS*. Jakarta
- Sapriya. 2008. *Pendidikan IPS*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press
- Sapriya. 2012. *Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Scriven, M. 1994. *The Structure of The Social Studies*, dalam The Structure of Knowledge and Curirculum. Chicago: Rand MacNally
- Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-8
- Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Grasindo

- Supriyanto, A. 1997. Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Dasar Di Daerah Diseminasi November 1997, Jilid 4, IKIP. Online
- Suryadi, A dan H.A.R Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suyata. 1998. *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi dan Implikasi Kebijakan*. Yogyakarta: IKIP
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tilaar, H. A. R. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Trianto. 2011. *Model pembelajaran terpadu; Konsep, Stategi, dan Implementasinya dalam kurikulum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-undang. 2006. Nomor 20 Tahun 2013. Bandung : Fokusmedia
- Winataputra Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing